

ABSTRAKS

Nur Syifa Al Fiyani, 1168010205 : “Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang DKI Jakarta”.

Pedagang Kaki Lima merupakan usaha dagang yang menetap dan ada pula yang berpindah tempat ke tempat lain untuk menjualkan barang dagangannya. Pedagang kaki lima selalu dianggap illegal dan menjadi sasaran tujuan kebijakan pemerintah, karena menjualkan barang dagangannya di fasilitas umum atau tempat kepentingan umum seperti di atas trotoar dan badan jalan, termasuk di Kawasan Pasar Tanah Abang. Pasar Tanah Abang merupakan pusat grosir terbesar di Asia Tenggara namun, dengan adanya para pedagang kaki lima yang melihat peluang besar untuk berjualan di Pasar Tanah Abang menjadi tidak tertata dengan baik yang menyebabkan kemacetan arus lalu lintas di Kawasan Pasar Tanah Abang. Dengan adanya masalah tersebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupaya untuk meminimalisir masalah dengan adanya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum. Namun, pada kenyataannya masalah pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang masih ada yang melanggar Peraturan Daerah tersebut. Maka dalam hal ini perlu dilakukan sebuah tindakan, yakni memaksimalkan pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam melakukan penertiban kepada Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang, sumber daya yang melaksanakan penegakan terhadap kebijakan Peraturan Daerah, disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan suatu kebijakan, dan mengetahui adanya Standard Operational Procedure (SOP) dalam kebijakan ketertiban umum Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang.

Dalam penelitian ini mengacu pada teori Implementasi Kebijakan Publik menurut George C. Edward III dalam Nawawi (2009 :136-137) untuk mengukur sejauhmana keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat dimensi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan ide-ide, aspirasi yang tidak menghasilkan angka tetapi berupa deskripsi dalam bentuk narasi dan analisis. menggunakan pendekatan deskriptif peneliti mampu menjelaskan, menggambarkan, serta memaparkan penelitian tentang Implementasi Kebijakan Ketertiban Umum Pedagang Kaki Lima di Pasar Tanah Abang DKI Jakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ketertiban pedagang kaki lima di Pasar Tanah Abang DKI Jakarta sudah berjalan dan cukup optimal meskipun ada beberapa hal yang masih belum efektif yaitu : (1) masih banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas-fasilitas umum sepanjang jalan kawasan Pasar Tanah Abang (2) masih banyaknya pedagang kaki lima yang belum paham terhadap kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 (3) Masih banyaknya Pedagang Kaki Lima yang melanggar perda No. 8 tahun 2007 (4) Pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP masih belum maksimal. Upaya yang harus dilakukan Pemprov DKI Jakarta yaitu Sosialisasi harus terus menerus dilakukan kepada para pedagang kaki lima agar memahami pentingnya kebijakan peraturan daerah secara merata, serta memberikan tempat relokasi yang layak untuk para pedagang kaki lima agar mereka setuju untuk dipindahkan ke tempat relokasi yang sudah disediakan.

Kata Kunci : Implementasi kebijakan, Ketertiban umum, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Nur Syifa Al Fiyani, 1168010205 : “Implementation of the public order policy of Street Vendors in Jakarta’s Tanah Abang Market”

Street vendors are settled trade businesses and some also move elsewhere to sell their wares. Street vendors are always considered illegal and are subjected to government policy objectives, as they sell their wares at public facilities or public areas of interest such as sidewalks and road agencies, including in Tanah Abang market area. Tanah Abang Market is the largest wholesale center in southeast Asia but, with the street vendors seeing a great opportunity to sell in Tanah Abang market is not well organized which causes traffic flow congestion in Tanah Abang market area. With this problem, the provincial government of DKI Jakarta sought to minimize the problem with local Regulation No. 8-year 2007 on public order. However, in fact the problem of street vendors in the market of Tanah Abang are still in violation of the local regulations. In this case, it is necessary to do an action, maximizing the implementation of local regulation policy.

This research aims to know the communication in regulating the street vendors in Pasar Tanah Abang, the resources that implement the enforcement of local regulatory policy, disposition or attitude of policy executor in implementing a policy, and know the existence of the Standard Operational Procedure (SOP) in the public order policy of street vendors in the market Tanah Abang.

In this study refers to the theory of implementation of public policy according to George C. Edward III in Nawawi (2009:136-137) to measure the success of a policy implementation can be seen from four dimensions i.e. communication, resources, disposition or attitude, and bureaucratic structure.

This research uses qualitative research methods with a descriptive approach, which is the research that produces ideas, aspirations that do not generate numbers but a description in the form of narrative and analysis. Using a descriptive approach researchers are able to explain, describe, and display research on the implementation of General order policy of street vendors in the market of Tanah Abang DKI Jakarta.

The results of this study showed that the implementation of policy of order of street vendors in Pasar Tanah Abang DKI Jakarta has been running and is quite optimal although there are some things that are still not effective: (1) There are still a number of street vendors who sell in public facilities along the road of Tanah Abang Market (2) still a number of street vendors who do not understand the policy of regional Regulation No. 8 year 2007 (3) Still many street vendors who violate the Perda No. 8 year 2007 (4) Supervision Made by Satpol PP is still not maximized. The efforts to do the provincial government of DKI Jakarta, socialization must be continuously done to the street vendors to understand the importance of local regulatory policy, and provide a decent relocation place for the street vendors so they agree to be transferred to the relocation place already provided.

Keywords : Policy implementation, Public Order, Street Vendors